

Surat Kabar : KOMPAS

Edisi : 5 Juli 2014

Subyek : Hutan

Hal : 16

Komitmen Kelestarian Perkebunan Ditagih

Kementerian Kehutanan meminta lembaga sertifikasi mencabut sertifikat kelestarian perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terbukti menadah hasil perambahan kawasan hutan. Investor perkebunan pemegang sertifikat produksi lestari seharusnya berkomitmen menjaga kelestarian dengan tidak menyerap bahan baku dari kawasan hutan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto mengatakan hal itu kepada jurnalis di Jakarta, Jumat (4/7). Turut hadir Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim Yetti Rusli, Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kemenhut Ruandha A Sugardiman, dan Kepala Pusat Humas Kemenhut Eka Widada.

"Kami sudah berkomunikasi dengan para pihak supaya tidak menerbitkan sertifikat lestari terhadap perusahaan yang menampung tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dari kawasan konservasi. Sertifikat kelestarian perusahaan yang menampung bahan baku tidak jelas asal-usulnya harus dicabut," kata Hadi.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan telah memerintahkan pemusnahan tanaman kelapa sawit ilegal yang mengokupasi 50.000 hektar (ha) dari 80.000 ha areal Taman Nasional Tesso Nilo di Riau. Perambah menanam kelapa sawit karena ada pabrik yang menadah TBS mereka.

Hal ini sangat merugikan industri kelapa sawit Indonesia yang berjuang keras memproduksi secara lestari 26 juta ton minyak kelapa sawit mentah (CPO) dari lahan seluas 9,2 juta ha pada 2013. Saat ini ada dua skema sertifikasi kelestarian, yakni Meja Bundar Minyak Sawit Lestari (RSPO) yang bersifat sukarela dan Standar Kelestarian Minyak Sawit Indonesia (ISPO) yang bersifat mandatori.

Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kemenhut Sonny Partono menambahkan, tim dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Kepolisian Daerah Riau terus menyidik perambah hutan dan penadahnya. Menurut Sonny, proses pengumpulan bukti terhadap perambahan kawasan konservasi dan perusahaan penadah di provinsi lain masih terus berlangsung. **(HAM)**